



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Germasani Mandiri Lintas-Sektor

melayani
bangsa

LAPORAN TAHUNAN PPID BPPSDMP 2024



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 mengatakan KIP adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan, agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, KIP juga membuka akses sebesar-besarnya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik BPPSDMP Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari implementasi KIP dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) pada Unit Eselon I (BPPSDMP) kepada masyarakat, pemangku kepentingan sekaligus sebagai dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi ini.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BPPSDMP Tahun 2024 menyajikan data Laporan Pemohon informasi, Waktu Pelayanan, Sekilas PPID BPPSDMP berupa program, Motto, Maklumat, SDM, Anggaran, Prasarana dan Sarana, serta Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi yang dilaksanakan lingkup BPPSDMP.



Pada pemeringkatan KIP Tahun 2024, Pelaksana BPPSDMP dan PPID Pembantu Pelaksana UPT meraih 8 Predikat Informatif, diantaranya adalah Polbangtan YoMa, Polbangtan Manokwari, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, Polbangtan Malang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Lembang, dan Bapeltan Lampung. PPID Pembantu Pelaksana UPT BPPSDMP yang mendapatkan Peringkat untuk Kategori Eselon II, adalah: BBPP Ketindan (Peringkat 5) dan Polbangtan YoMa (Peringkat 6). Sedangkan PPID BPPSDMP mendapatkan Peringkat 5 untuk Kategori Eselon I. Ini akan menjadi motivasi dan menambah semangat bagi PPID BPPSDMP dalam memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BPPSDMP Tahun 2024 masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan. Sehingga saran dan masukan kami perlukan guna perbaikan selanjutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BPPSDMP Tahun 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

PPID Pelaksana BPPSDMP
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian,



Siti Munifah
Dr. Ir. Siti Munifah, M. Si.



KATA PENGANTAR

01

DAFTAR ISI

03

BAB I. PENDAHULUAN

05

BAB II. SEKILAS PPID BPPSDMP

2.1 Gambaran PPID BPPSDMP

07

2.2 Motto dan Maklumat Layanan PPID

2.3. Visi dan Misi

2.4 Struktur Organisasi

2.5 Program dan Kegiatan

2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Anggaran

2.7 Tatacara Permohonan Informasi

2.8 Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik

2.9 Inovasi dan Kolaborasi Pelayanan
Informasi Publik Dalam Keterbukaan
Informasi Publik





BAB III. PELAKSANAAN PPID BPPSDMP

36

3.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi

3.2 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)

3.3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

3.4 Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

3.5 Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan Pekerjaan

3.6 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori

BAB IV. KENDALA, TANTANGAN DAN SOLUSI

41

4.1 Kendala

4.2 Tantangan

4.3 Solusi

BAB V. PENUTUP

43





BAB I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan good governance di suatu negara. KIP memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan.

Pengertian KIP adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. KIP juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Manfaat KIP diantaranya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), UU Nomor 14 tahun 2008 secara garis besar implikasinya melekat pada dua pihak yaitu penyelenggaraan negara, dalam hal ini Pusat dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik.



Salah satu hal yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersifat terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang transparan dan akuntabilitas tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Kementan selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan Pemerintah yang terbuka dan transparan atau good governance. Dengan demikian, publik mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) selaku Unit Eselon I berkomitmen untuk turut mendukung keterbukaan informasi publik. Komitmen ini tertuang dalam Penandatanganan Komitmen KIP oleh Pejabat Eselon I dan II lingkup BPPSDMP.

Selain itu, dukungan BPPSDMP juga diwujudkan dalam bentuk pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana baik di tingkat Pusat maupun UPT yang didukung dengan anggaran serta dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana lainnya.



BAB II. SEKILAS PPID BPPSDMP

2.1 Gambaran PPID BPPSDMP

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk mendapatkan informasi ini merupakan hak asasi manusia dan KIP merupakan wujud negara demokratis.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab/good governance melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Pelayanan informasi publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik



GAMBARAN PPID BPPSDMP

Menteri Pertanian (Mentan) telah menunjuk atasan PPID tertinggi, PPID Utama, PPID Pelaksana serta PPID Pembantu Pelaksana dan telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor: 382.2/KPTS/KP.240/A/08/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.

BPPSDMP sebagai PPID Pelaksana Eselon I telah mengimplementasikan KIP melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor: 11/Kpts/HM.110/01/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP.

Untuk masing-masing Unit Kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit kerja tersebut, sebagai berikut :



No	NAMA UPT	NOMOR SK
1	Balai Besar Pelatihan manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi	Surat Kepala Balai Besar Pelatihan manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Nomor : 10/Kpts/HM.130/1.5/02/2024
2	Balai Besar Pelatihan dan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan dan Kesehatan Hewan Cinagara Nomor : 013/Kpts/HM.130/I.12/01/2024
3	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang	Surat Keputusan Kepala Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor : 26/Kpts/OT.080/I.13.1/01/2024
4	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Nomor : 04/Kpts/HM.130/I.1.14.1/03/2024
5	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Nomor : 015/Kpts/HM.130/I.15/01/2024
6	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Nomor : 52/Kpts/OT.080/I.17.1/02/2024
7	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Nomor : 06/Kpts/OT.200/I.16/01/2024



No	NAMA UPT	NOMOR SK
8	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 7.1/Kpts/HM.130/I.18/01/2024
9	Balai Pelatihan Pertanian (BAPELTAN) Lampung	Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Nomor : 20/Kpts-KPA/HM.130/I.20/01/2024
10	Balai Pelatihan Pertanian (BAPELTAN) Jambi	Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi Nomor : 47/Kpts/HM.130/I.19/01/2024
11	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Bogor	Surat Keputusan Direktur Polbangtan Bogor Nomor : 05/KPA/HM.130/1.7/01/2024
12	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) YoMa	Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang Nomor : 12/ Kpts/ HM.110/ I.8/ 01/ 2024
13	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Gowa	Surat Keputusan Direktur Polbangtan Gowa Nomor : 1311/Kpts/OT.050/I.10/02/2024
14	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Malang	Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Nomor : 801/Kpts/OT.080/I.9.1/01/2024



No	NAMA UPT	NOMOR SK
15	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan	Surat Keputusan Direktur Polbangtan Medan Nomor: 29/OT.080/I.6/01/2024
16	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Manokwari	Surat Keputusan Direktur Polbangtan Manokwari Nomor : 16/Kpts/HM.130/I.2.7/01/2024
17	Politeknik Enjiniring Pertanian (PEPI) Serpong	Surat Keputusan Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Serpong Nomor :005/KPTS/HM.130/I.24/10/2024
18	Politeknik Enjiniring Pertanian (PEPI) Serpong SMK PPN Banjarbaru	Surat Keputusan Kepala SMK PPN Banjarbaru Nomor :16/Kpts/HM.130/I.2.2/01/2024
19	SMK PPN Kupang	Surat Keputusan Kepala SMK PPN Kupang Nomor : 77/Kpts/PW.410/I.23/2/2024
20	SMK PPN Sembawa	Surat Keputusan Kepala SMK PPN Sembawa Nomor : 16a/SK/HM.120/I.21/1/2024



Pengumpulan dan penyampaian informasi dilakukan melalui koordinasi antar unit kerja lingkup BPPSDMP. Mulai dari unit kerja Eselon II Pusat hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berjumlah 20 UPT dan tersebar di seluruh Indonesia. Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat-rapat atau pertemuan dan diskusi secara offline dan online, pembinaan, pengawalan dan pendampingan, serta workshop secara hybrid.

Untuk pengumpulan bahan-bahan dokumen, seperti Daftar Informasi Publik (DIP) dan dikoordinir oleh PPID Pelaksana dan Pembantu Pelaksana di BPPSDMP.

Pengumpulan ini dilakukan oleh Tim Pengelola Layanan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDMP dan terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pustakawan, Arsiparis dan Fungsional umum serta Kelompok Kerja dan Tim Kerja yang berwenang dalam pembuatan DIP serta dokumen lainnya tentang PPID.



MOTTO DAN MAKLUMAT PPID

2.2 Motto dan Maklumat PPID

Cepat

Berkualitas

Mudah



“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”





2.3 Visi dan Misi

Visi :

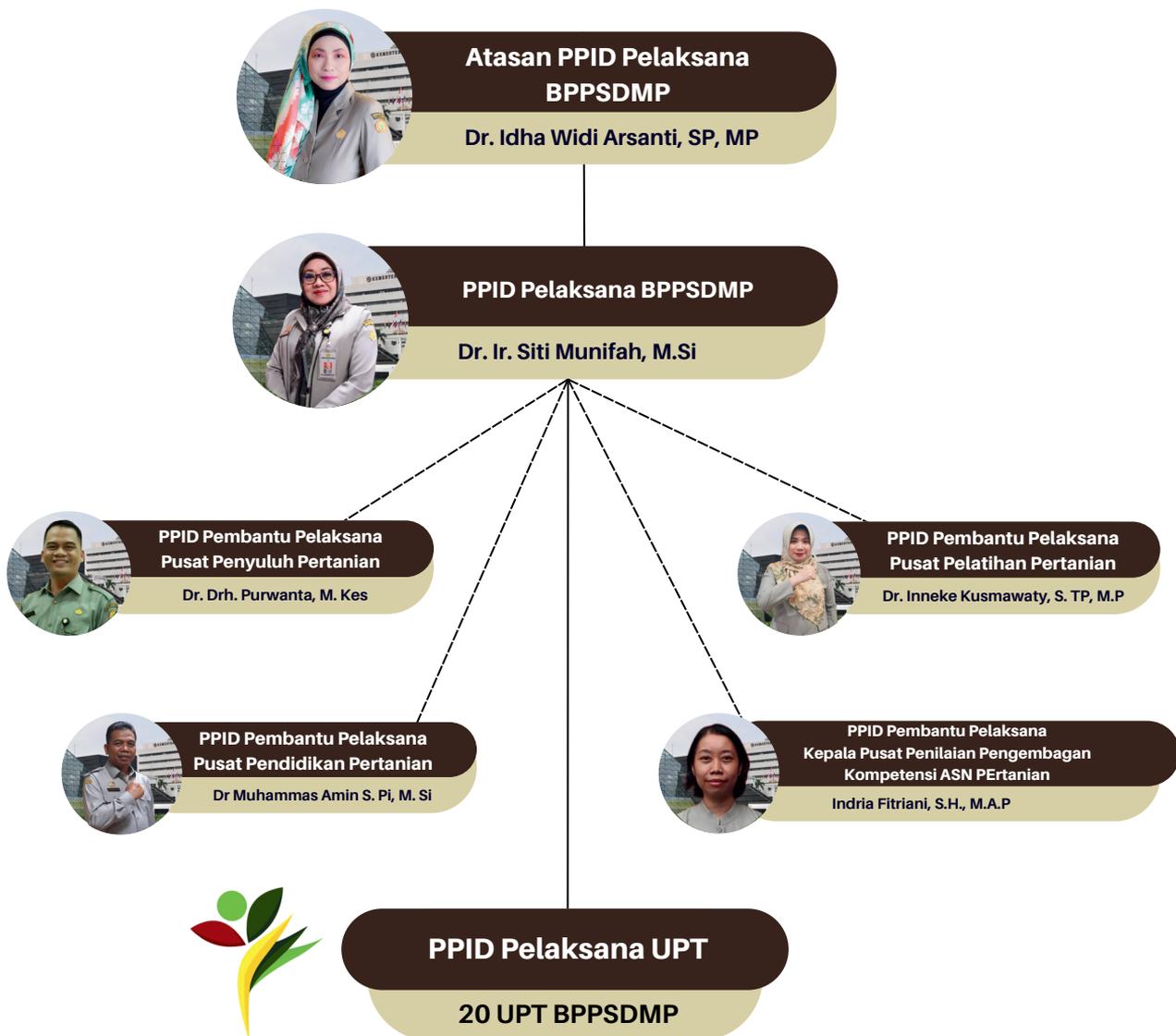
“Terwujudnya Unit Pengelolaan Informasi Publik BPPSDMP yang terbuka dan transparan serta inovatif sebagai lembaga yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha menuju pertanian maju, mandiri, dan modern”.

Misi:

1. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik BPPSDMP yang lengkap dan up to date.
2. menyediakan dan memberikan pelayanan dokumentasi informasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis online dan user friendly yang sesuai dengan kebutuhan publik; dan
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan dan kinerja BPPSDMP yang akurat.



2.4 Struktur Organisasi PPID BPPSDMP





2.5 Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Dalam pelaksanaan dan Implementasi Pelayanan Informasi lingkup BPPSDMP terus berkoordinasi dengan PPID Utama selaku Koordinator pelaksanaan pelayanan publik Kementan.

Setiap tahun PPID BPPSDMP memiliki program dan rencana pelaksanaan pelayanan informasi publik sebagai berikut:

- Pemutakhiran DIP dan Daftar Informasi yang dikecualikan;
- Pemutakhiran regulasi, diantaranya: SK Pejabat Pengelola PPID, SK Petugas Layanan Informasi Publik, SK Daftar Informasi Publik dan SOP Layanan informasi Publik
- Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup Kantor Pusat yang kemudian diikuti oleh seluruh Pimpinan Kepala UPT lingkup BPPSDMP;
- Pengawasan dan pendampingan layanan informasi publik UPT serta Pemeringkatan KIP lingkup Kementan;
- Peningkatan anggaran mendukung keterbukaan informasi publik lingkup BPPSDMP;
- Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan website BPPSDMP; dan
- Updating data dan dokumen baik melalui layanan SIDADO, website dan Portal PPID BPPSDMP sesuai dengan SOP yang ditentukan.



Kegiatan PPID BPPSDMP yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai berikut:

- Pembinaan pengelolaan pengelolaan DIP di portal PPID, website, dan media sosial.
- BPPSDMP dengan aktif melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi baik melalui Portal PPID, website maupun dari platform media sosial sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Layanan tanggapan atas permohonan informasi publik di dokumentasikan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan PPID BPPSDMP.
- Evaluasi dan monitoring melalui laporan berkala (bulanan dan tahunan) PPID Pelaksana Eselon I dan UPT lingkup BPPSDMP.
- Penandatanganan Komitmen oleh Kepala Badan PPSDMP, Sekretaris Badan PPSDMP, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, dan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.



- Pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementan Tahun 2024, PPID pelaksana BPPSDMP dan PPID Pembantu Pelaksana UPT lingkup BPPSDMP mendapatkan beberapa penghargaan antara lain:
 1. Peringkat 5 Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Unit Kerja Eselon I dengan Predikat Informatif.
 2. PPID Pembantu Pelaksana UPT lingkup BPPSDMP masuk dalam nominasi predikat informatif dan 2 diantaranya masuk dalam 9 besar untuk kategori Unit Kerja Eselon II, yaitu:
 - BBPP Ketindan (peringkat 5)
 - BBPP Batu
 - BBPP Lembang
 - Polbangtan Yogyakarta-Magelang (peringkat 6)
 - Polbangtan Manokwari
 - Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia
 - Polbangtan Malang
 - Bapeltan Lampung
 3. Kategori khusus penghargaan Penderasan Informasi Publik
 - Polbangtan Yogyakarta-Magelang : Terbaik I
 - Pusat Penyuluhan Pertanian : Terbaik II
 - BBPP Ketindan : Terbaik III



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



**Peringkat 5 Kategori Eselon 1 Predikat
Informatif Peningkatan Terbukaan
Informasi Publik 2023**



2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran

a. Sumber Daya Manusia

Dukungan SDM, yaitu disusunnya struktur PPID lingkup BPPSDMP dan peningkatan kompetensi petugas dan pengelola layanan informasi baik di pusat maupun UPT lingkup BPPSDMP melalui Workshop atau Pelatihan

b. Anggaran

Anggaran yang disiapkan BPPSDMP dalam mendukung implementasi KIP sebesar Rp 2.500.000.000, terdiri dari:

- Penyusunan dan Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik.
- Penyusunan dan Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak.
- Koordinasi dan Workshop Kehumasan.
- Penderasan arus informasi melalui media sosial dan pengelolaan website.
- Pengelolaan dan Pembinaan PPID.
- Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan.



2.7 Tata Cara Permohonan Informasi

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan informasi publik di BPPSDMP dilakukan secara terpusat di bagian PPID Pelaksana BPPSDMP, berlokasi di Gedung D lantai 7 Kantor Pusat Kementan.

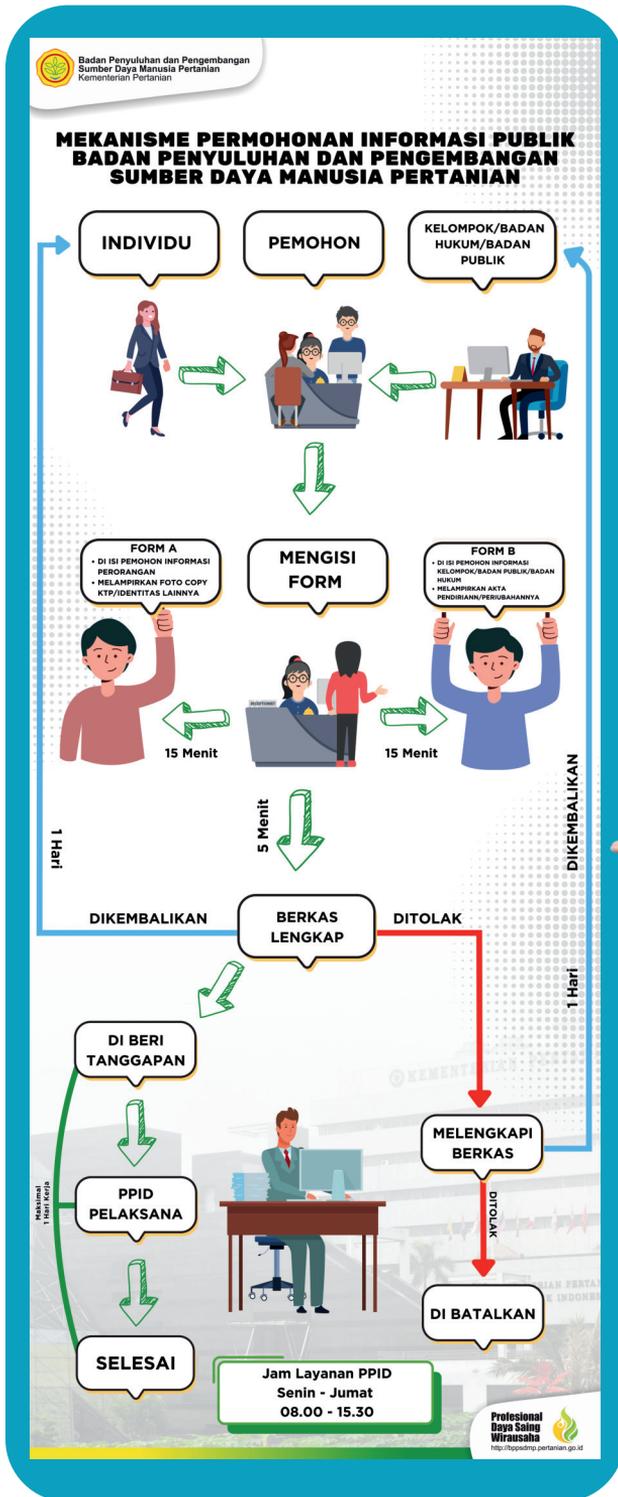
Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/instansi/lembaga/ Badan Publik, yang datang secara langsung maupun tidak langsung atau melalui Portal PPID BPPSDMP.

Setiap data dan informasi yang tersedia dan dimiliki oleh BPPSDMP yang terkait dengan tugas dan fungsi BPPSDMP, maupun data dan informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan publik didokumentasikan dengan baik dan sistematis. Penyimpanan data dan informasi tersebut diantaranya berupa hardcopy, tercetak, elektronik, video, foto dan audiovisual melalui aplikasi SIDADO dan Website. Data dan informasi tersebut juga disebarluaskan melalui akun resmi media sosial BPPSDMP.

Penyebaran dan pengelolaan media sosial BPPSDMP dilaksanakan secara profesional dan perkembangan informasi terkini sesuai dengan isu terkini dari media sosial Kementerian Pertanian, karena dengan memanfaatkan media sosial ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai KIP.



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI





Adapun akun resmi media sosial BPPSDMP dapat diakses melalui :



<https://www.facebook.com/bppsdmp>



<https://youtube.com/bppsdmpkementanri>



<https://www.twitter.com/badansdm>



<https://www.instagram.com/bppsdmp>



<https://www.tiktok.com/@bppsdmp>



SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.8 Sarana dan Prasarana pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi publik yang diterima BPPSDMP akan dilayani sesuai dengan mekanisme layanan informasi publik Kementan. Untuk melayani permohonan informasi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan atas layanan yang diberikan.



Ruang Layanan
Informasi Publik



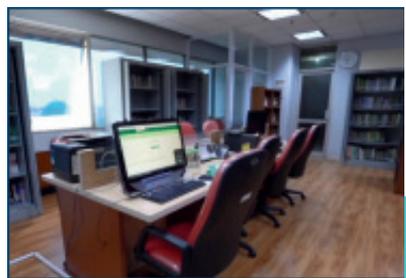
Ruang Diorama



Ruang AOR



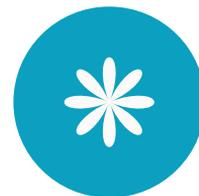
Meja Layanan
Informasi Publik



Kelengkapan
Perangkat IT

Website BPPSDMP dan
Kelengkapan dokumen di Ruang Layanan, Portal
PPID, dan Website BPPSDMP





Waktu Pelayanan PPID

Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB

Jum'at : 08.00 - 16.30 WIB



Whatsapp Number

087864941892



Email Address

bppsdmp@pertanian.go.id



Website

<https://bppsdmp.pertanian.go.id/>



Social Media

@bppsdmp



2.9 Inovasi dan Kolaborasi Pelayanan Informasi Publik Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Inovasi dalam keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memadukan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan. Inovasi yang dikembangkan berupa inovasi pelatihan secara online dan inovasi pengembangan aplikasi.

Inovasi pelatihan melalui pelatihan/webinar/ podcast secara online masih terus dikembangkan dan dilaksanakan dengan rutin di setiap minggunya. seperti Kementan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) di hari jum'at, Ngobrol Asik (Ngobras) di hari selasa, Bertani on Cloud (BoC) di hari kamis, dan Millennial Agriculture Forum (MAF) di hari sabtu, serta Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh.

Selain inovasi pelatihan secara online, pengembangan inovasi lainnya yaitu mengembangkan aplikasi layanan informasi terkait data dan informasi bidang penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian yang dapat diakses melalui smartphone dan PC. Aplikasi layanan informasi tersebut adalah:



INOVASI

1. Pengembangan Platform CERMAT sebagai sistem pelayanan informasi publik terintegrasi berbasis kecerdasan buatan “LIENA”



2. SIPERCANTIK Vokasi Pertanian

Pengembangan sistem integrasi berbasis android untuk perencanaan anggaran dan capaian pertanian (SIPERCANTIK VOKASI PERTANIAN)





Sedangkan Inovasi pelayanan yang diciptakan dan dikembangkan oleh UPT Lingkup BPPSDMP yaitu:

1. Cangkir Tani dan Anak Kandang (Polbangtan Yogyakarta-Magelang)

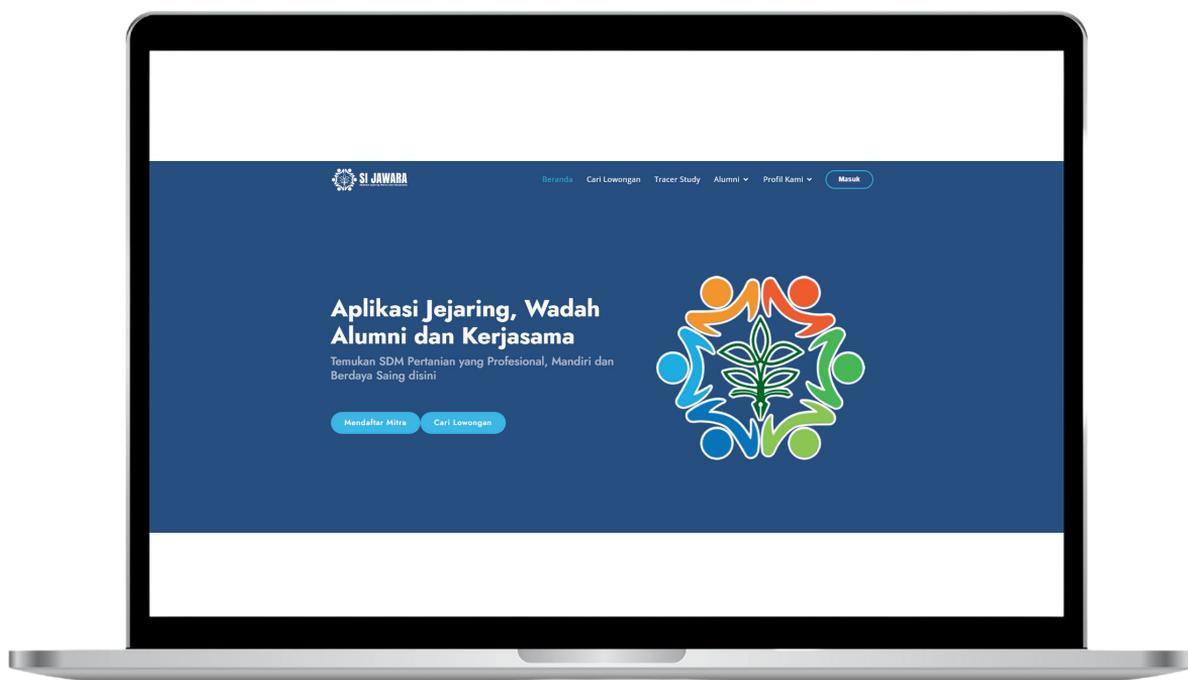
Cangkir Tani (Berbincang dan Berpikir Pertanian) ini merupakan program talkshow yang membahas tema – tema seputar teknis pertanian dan tokoh inspiratif bagi masyarakat. Program Cangkir Tani telah menayangkan 18 episode bersama narasumber dan praktisi yang ahli di bidangnya. Sedangkan untuk program Anak Kandang, telah merilis 16 episode yang memuat teknis pemeliharaan ternak. Keduanya ditayangkan melalui live streaming maupun tayang perdana, dan dapat diakses oleh publik melalui kanal resmi Polbangtan Yogyakarta-Magelang.





2. SiJAWARA (Polbangtan Malang)

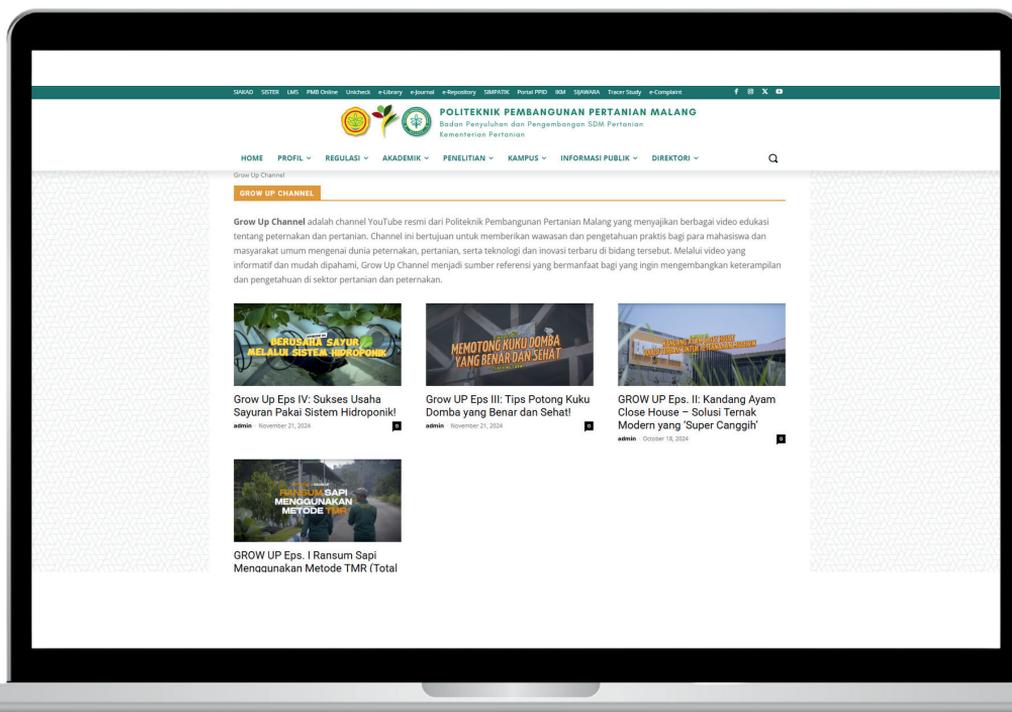
LINKAN ini merupakan portal tracer study Pusat Pendidikan Pertanian yang memberikan layanan informasi kebhkerjaan alumni terintegrasi dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kementan. dan menghubungkan dengan mitra usaha dan perbankan ntuk memberikan layanan keuangan. LINKAN ini juga memberikan informasi kepada alumni terkait peluang usaha dan kerja, akses layanan keuangan dan informasi magang dengan mitra yang memiliki kerjasama dengan BPPSDMP.





3. Grow Up Channel (Polbangtan Malang)

Merupakan channel YouTube resmi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang yang menyajikan berbagai video edukasi tentang peternakan dan pertanian. Channel ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan praktis bagi para mahasiswa dan masyarakat umum mengenai dunia peternakan, pertanian, serta teknologi dan inovasi terbaru di bidang tersebut.





4. SIMPHONI EMAS P4S (BBPP Ketindan)

Sinergi Manajemen Pelatihan Online bagi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya dalam Melahirkan Generasi Emas SDM Pertanian.





5. PRO Si KAMPUNG (Polbangtan Manokwari)

Merupakan strategi program sinergitas penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dosen PolbangTan Manokwari berbasis kampung yang melibatkan stakeholder internal dan eksternal yang berdampak secara langsung untuk meningkatkan produktivitas pangan secara berkelanjutan sehingga kesejahteraan petani meningkat.





K-SMART

Kerjasama antara BPPSDMP dengan Korea Agency of Education, Promotion & Information Service in Food, Agriculture, Forestry & Fisheries (EPIS) melalui Enhancing Milenial Farmers' Income by Adopting K-Smart Farm Technologies in Indonesia dan akan berakhir pada Desember 2025. Project berupa pembangunan smart greenhouse sebanyak 11 di BBPP Ketindan dan sebanyak 13 di Polbangtan Bogor.





KOLABORASI

APO (ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION)

Kerjasama antara BPPSDMP dengan Asian Productivity Organization (APO) Jepang dengan mengundang peserta dari 17 negara anggota APO sebanyak 30 orang dan dilaksanakan pada 10-14 Juni 2024 di Jogjakarta. Tema yang diangkat pada kerjasama 2024 adalah Workshop on Building Community-driven Farm Schools

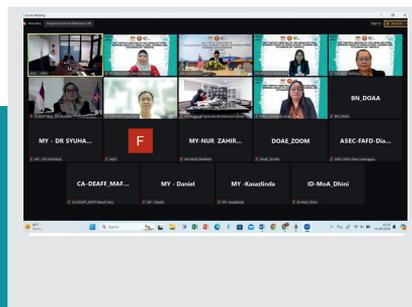




AWGATE

(ASEAN SECTORAL WORKING GROUP ON AGRICULTURAL TRAINING AND EXTENSION)

The 30th AWGATE Meeting diselenggarakan secara online, yang merupakan kolaborasi negara-negara ASEAN di sektor pertanian, dengan anggota sebagai berikut : Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, Viet Nam, Lao PDR, Myanmar, Cambodia.





BAB III

PELAKSANAAN PPID BPPSDMP

3.1 Permohonan Informasi

BPPSDMP merupakan Badan Publik yang salah satu tugasnya adalah menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi. Selama tahun 2024 terdapat beberapa permohonan informasi, baik melalui portal PPID BPPSDMP yang terintegrasi dengan PPID Utama Kementan, maupun di berbagai saluran media seperti e-mail, pesan WhatsApp, konter layanan dan media lain yang dimiliki oleh unit kerja lingkup BPPSDMP.

Jumlah permohonan informasi selama tahun 2024 sebanyak 10.819 permohonan, dengan sebaran sebagai berikut:

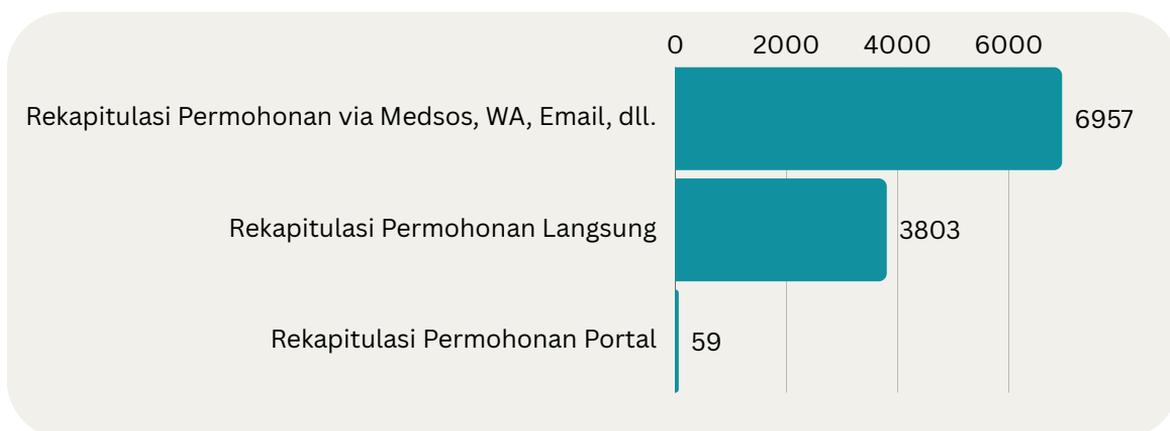
Rekapitulasi Permohonan Portal	Rekapitulasi Permohonan Langsung	Rekapitulasi Permohonan via medsos, WA, email, dll
59	3803	6957



WAKTU PELAYANAN INFORMASI

3.2 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan panduan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan waktu respon pelayanan informasi terdapat beberapa kategori, yaitu: 1-2 hari (Baik Sekali); 3-5 hari (Baik); 6-10 hari (Cukup); 11-17 hari (Buruk) dan > 17 hari (Buruk Sekali).



Dari Matrix diatas menunjukkan pelayanan IP berdasarkan waktu masuk kategori baik sekali dimana waktu pelayanan tercepat 5 menit dan pelayanan paling lama 12 hari 1 jam 46 menit 49 detik



3.3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Pada tahun 2024 ini terdapat 2 orang pemohon yang mengajukan keberatan informasi atas 5 permohonan pada portal PPID BPPSDMP dan telah diselesaikan secara internal.

Jumlah Pemohon	Keberatan Informasi	Alasan
2 Orang	5 Keberatan	Jawaban yang diberikan tidak sesuai

3.4 Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak dan Alasan Penolakan

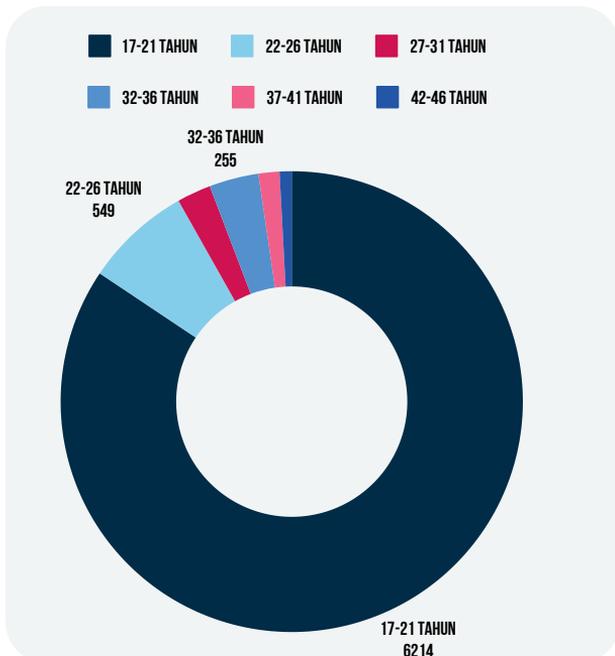
Pada tahun 2024 tidak ada permohonan yang ditolak dan alasan penolakan



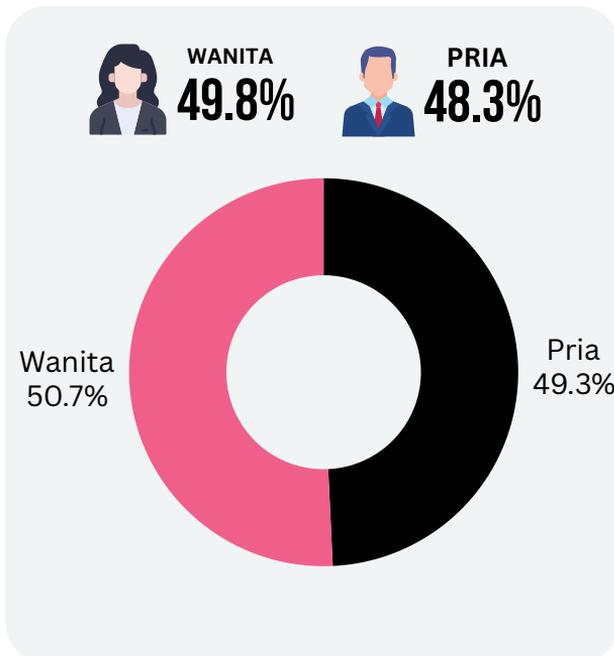
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

3.5 Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin dan Pekerjaan

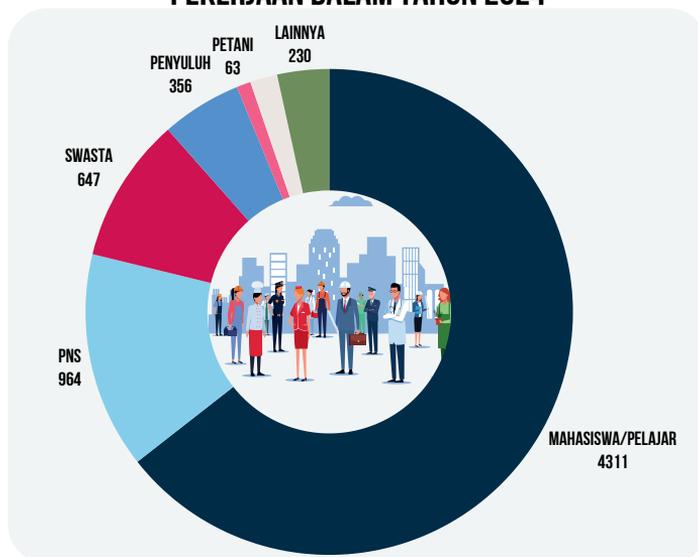
REKAPITULASI UMUR DALAM TAHUN 2024



REKAPITULASI JENIS KELAMIN DALAM TAHUN 2024



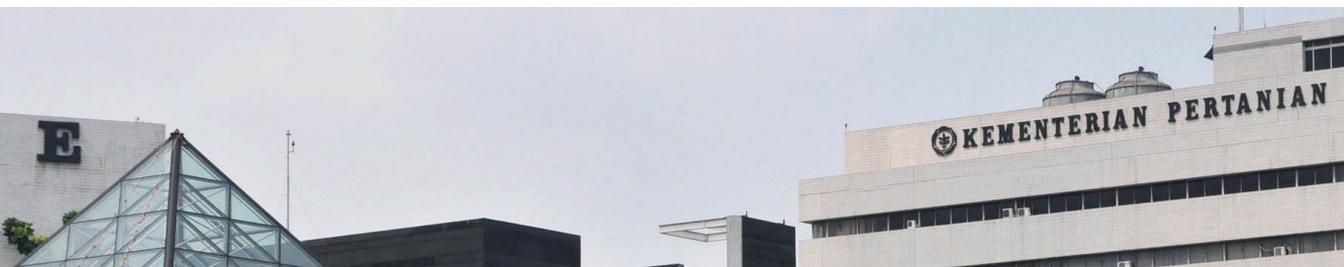
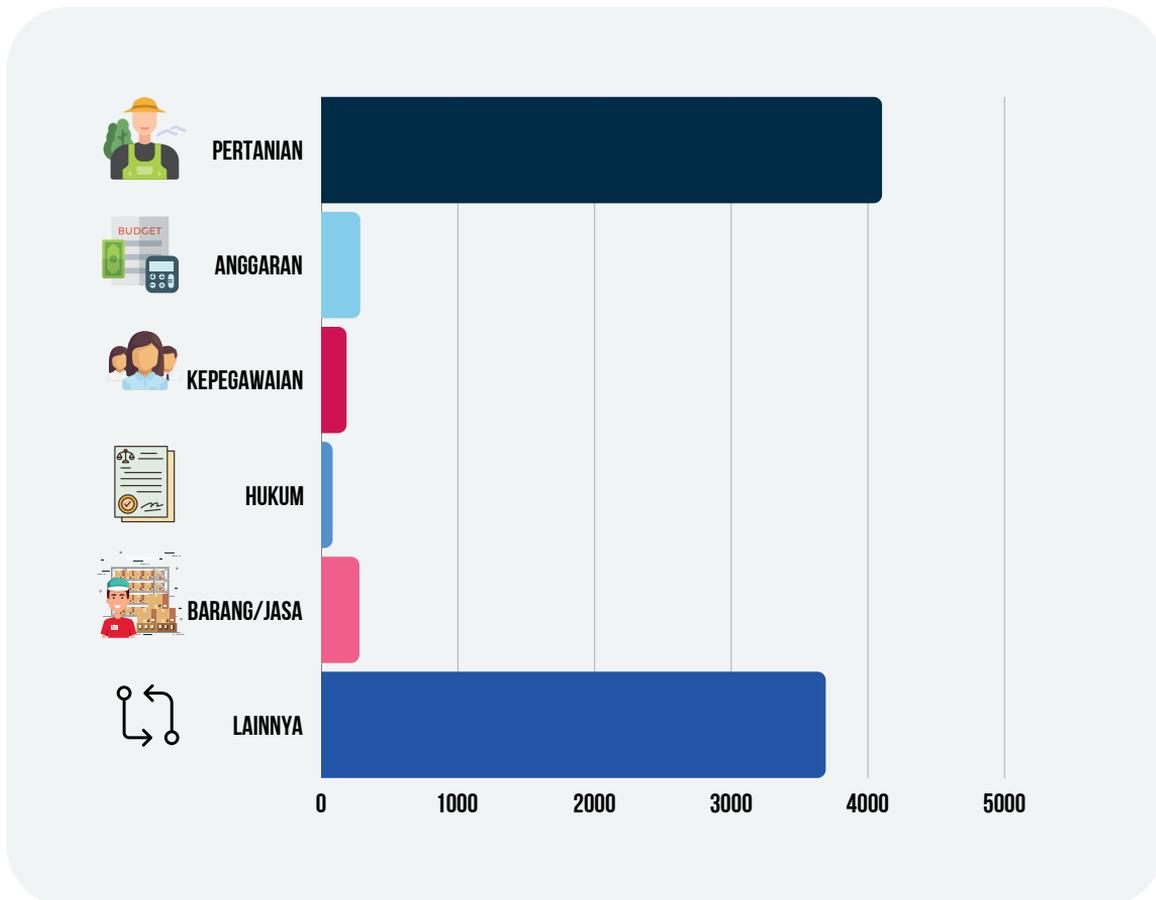
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN DALAM TAHUN 2024





3.6 Jumlah Permohonan Berdasarkan Kategori Informasi

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN KATEGORI INFORMASI





BAB IV. KENDALA, TANTANGAN DAN SOLUSI

4.1 Kendala

Pelayanan informasi publik BPPSDMP tahun 2024 mengalami kendala sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran pengelolaan layanan informasi publik belum optimal sebagai salah satu kegiatan prioritas yang penting;
2. Pengelolaan Informasi Publik masih belum populer dan belum banyak diketahui karena belum meratanya pemahaman atas keterbukaan informasi publik pada Unit Kerja di lingkungan BPPSDMP pusat dan UPT lingkup BPPSDMP;
3. Kurangnya kesadaran dan komitmen dari pegawai terhadap PPID;
4. Kurangnya pemahaman petugas PPID di lingkup UPT BPPSDMP dalam dalam pengisian dan melampirkan bukti fisik untuk SAQ;
5. Hasil evaluasi pemeringkatan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama

Kementerian Pertanian menunjukkan beberapa UPT lingkup BPPSDMP yang masih dalam kategori menuju informatif, cukup informatif, bahkan kurang informatif. UPT yang masuk kategori dalam kategori tersebut adalah:

1. Kategori menuju informatif : Polbangtan Medan, BBPMKP Ciawi, Polbangtan Bogor, dan SMK PPN Sembawa
2. Kategori cukup informatif : BBPP Kupang, BBPP Binuang, BBPP Batangkaluku, Polbangtan Gowa, SMK PPN Banjarbaru, dan SMK PPN Kupang.
3. Kategori kurang informatif : Bapeltan Jambi dan BBPKH Cinagara



BAB IV. KENDALA, TANTANGAN DAN SOLUSI

4.2 Tantangan

Pelayanan informasi publik BPPSDMP tahun 2024 mengalami tantangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang telah diraih pada tahun 2024;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID;
3. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak akses informasi;
5. Mengembangkan sistem pengelolaan informasi yang efektif dan efisien.

4.3 Solusi/Tindak Lanjuti

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik secara terus menerus di BPPSDMP;
2. Sosialisasi Standard Operational Procedure (SOP) Pelayanan Informasi, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Keberatan dan Sengketa Informasi Publik, SOP Dokumentasi Informasi Publik, SOP Pengelolaan Dokumen Informasi Publik, dan SOP Pemutakhiran Data dan Informasi dalam Situs Web BPPSDMP;
3. Melakukan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan informasi publik di BPPSDMP pusat dan UPT lingkup BPPSDMP;
4. Koordinasi secara berkala dan peningkatan kualitas SDM pengelola dan komitmen seluruh pegawai tentang keterbukaan informasi publik pada pelayanan publik yang dilaksanakan.



BAB V. PENUTUP

Laporan tahunan PPID BPPSDMP ini sebagai salah satu pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja PPID baik PUsat maupun UPT pada tahun yang akan datang.

Kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan PPID tidak terlepas dari perlunya koordinasi yang baik dengan setiap unit kerja di lingkup Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pada tahun ini PPID BPPSDMP Pusat dan UPT meraih penghargaan yang membanggakan. Di ajang pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 PPID BPPSDMP pusat dan PPID Pembantu Pelaksana UPT meraih 8 Predikat Informatif, diantaranya adalah Polbangtan Yogyakarta-Magelang, Polbangtan Manokwari, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, Polbangtan Malang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Lembang, dan Bapeltan Lampung. PPID Pembantu Pelaksana UPT BPPSDMP yang mendapatkan Peringkat untuk Kategori Eselon II, adalah: BBPP Ketindan (Peringkat 5) dan Polbangtan Yogya-Magelang (Peringkat 6). Sedangkan PPID BPPSDMP mendapatkan Peringkat 5 untuk Kategori Eselon I.

Selain itu, pada tahun ini pun BPPSDMP memborong penghargaan kategori khusus dalam penderasan informasi publik yaitu Polbangtan Yogyakarta-Magelang (terbaik I), Pusat Penyuluhan Pertanian (terbaik II), dan BBPP Ketindan (terbaik III).

Demikian laporan pelaksanaan PPID tahun 2024, sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Semoga prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan serta meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233

SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

Nomor : B-6552/KU.110/I.1/02/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu bundel
Hal : Laporan Tahunan PPID BPPSDMP
TA 2024

28 Februari 2025

Yth. **PPID Utama Kementerian Pertanian**

di -

Tempat

Bersama ini terlampir disampaikan Laporan Tahunan PPID TA 2024 Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Laporan Tahunan PPID wajib disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID BPPSDMP tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Badan PPSDMP,

Dr. T. Siti Murnifah, M.Si.
NIP. 196503231994032002

Tembusan:

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.